



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUYADI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 453131

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.405.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.405.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	241.400.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS F700RG TX MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, HONDA PCX ABS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 32.700.000		
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL GT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.300.000		
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 31.400.000		
5. MOTOR, VESPA SPRINT S Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	250.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	195.000.000
Sub Total	Rp.	2.091.400.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.091.400.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SUYADI
NIK : 3275111606620007
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA BEKASI
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 5 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.




Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>


Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA



Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi &
Pengaduan: (021) 1500200 

informasi@pajak.go.id 

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor : **BPE-**

BPE 57387/CT/KPP.3304/2026

Tanggal: 27 Februari 2026

NPWP : 3275111606620007

Nama

Wajib : SUYADI

Pajak

: SPT Tahunan PPh

Jenis SPT Wajib Pajak Orang
Pribadi

Tahun
Pajak : 2025

Masa : Januari - Desember